

Melayani Hingga Luar Daerah, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LAB K3) Optimis Pendapatan Asli Daerah 2023 Tercapai



Sumber gambar:

<https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2023/06/19/melayani-hingga-luar-daerah-lab-k3-optimis-pada-2023-tercapai/>

Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lab K3) menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 dengan mempersiapkan temu pelanggan.

Kepala Lab K3 Provinsi Kalsel, Noorlianisyah menjelaskan, kegiatan temu pelanggan bagi perusahaan, merupakan kegiatan rutin setiap satu tahun sekali yang digelar biasanya pada triwulan pertama.

Temu pelanggan tahun ini rencananya 100 perusahaan yang akan diundang, 50 perusahaan langganan, 50 perusahaan baru, yang tersebar di 13 kabupaten/kota se-Kalsel.

Tidak hanya itu, pihaknya ingin perusahaan mengetahui pelayanan yang ada di Lab K3 Prov. Kalsel sebagai Laboratorium yang sudah terakreditasi ISO 17025:2017 dengan semua parameter layanan. “Semoga akan bertambah perusahaan yang menggunakan layanan Lab K3,” tuturnya.

Noorlianisyah menambahkan, dari hasil ekpose kegiatan yang baru digelar, pihaknya mampu merealisasikan seluruh kegiatan sekitar 97 persen lebih, baik dari APBD dan Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu hingga tahun 2022 tadi, ada sebanyak 207 perusahaan yang telah dilayani, keberhasilan ini tentu dari keaktifan dalam promosi baik melalui media sosial dan media massa.

“Terkait pendapatan BULD tahun 2022 tadi, mencapai Rp2,4 miliar, meski ditargetkan hanya Rp1,6 miliar, sehingga tahun 2023 ini mengusulkan Rp2,5 miliar

rupiah. Saya optimis mampu, karena pelayanan telah didukung penuh SDM profesional,” tutupnya.

Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Noorlianisyah mengatakan, hingga di triwulan ke dua, pihaknya sudah melakukan pelayanan hingga ke Kalimantan Tengah.

“Memasuki bulan ke enam di tahun 2023, alhamdulillah sudah sekitar 61 perusahaan yang kami layani dari berbagai jenis perusahaan di 13 kabupaten/kota dan Kalimantan Tengah,” ucapnya, Banjarmasin, Senin (19/6/2023).

Lily menambahkan, hingga pertengahan tahun 2023 sekitar 102 surat permohonan dari perusahaan yang sudah masuk ingin melakukan pelayanan di Lab K3. Lalu dari data yang sudah masuk, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai kurang lebih Rp833 Juta dari target ditetapkan sebesar Rp1.6 Miliar. Rencananya akan dilakukan perubahan target menjadi Rp2.5 Miliar.

“Kami akan memastikan bahwa Lab K3 akan terus maksimal memberikan pelayanan pengujian dengan menurunkan dua hingga tiga tim secara bergantian,” terangnya.

Lebih lanjut untuk media promosi pelayanan Lab K3, pihaknya baru saja membangun videotron di depan kantor dengan menampilkan berbagai macam kegiatan, fasilitas serta keunggulan yang dimiliki dalam bentuk gambar dan video.

“Kami juga menggunakan media sosial seperti instagram untuk menyebarkan kegiatan pelayanan yang kami lakukan di perusahaan,” tuturnya.

Dengan berbagai strategi yang telah dilakukan, Lily optimis di tahun 2023 pihaknya bisa mencapai target PAD yang telah ditentukan.

“Kita yakin dengan SDM dan peralatan yang dimiliki Lab K3, tahun ini bisa kembali mencapai target PAD seperti tahun sebelumnya,” tuturnya.

Sumber berita:

1. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2023/06/19/melayani-hingga-luar-daerah-lab-k3-optimis-pad-2023-tercapai/>, 19 Juni 2023.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/706474/lab-k3-kalsel-akan-tingkatkan-pad-2023-dengan-temu-pelanggan?video=>, 30 Januari 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)